

## ***Peran Komite Madrasah dalam Penguatan Hubungan Sekolah dan Masyarakat***

**Anwar Hidayat, Romlah, Oki Dermawan**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [anwarhidayat792@gmail.com](mailto:anwarhidayat792@gmail.com)

### ***Abstract***

*The role of school committees is essential in strengthening school–community relations and improving educational quality. This study aims to analyze and describe the role of school committees in enhancing community relations at MIN 6 and MIN 9 Bandar Lampung. This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews and documentation. The findings indicate that school committees at both institutions have performed their functions relatively effectively through four main roles: (1) advisory agency in curriculum policy formulation and budget planning, (2) supporting agency in providing financial, intellectual, and human resource assistance, (3) controlling agency in monitoring program implementation and evaluation, and (4) mediator agency in facilitating communication between schools and the community. Nevertheless, several challenges remain, particularly related to limited financial resources and the need for improved coordination in community engagement. These findings suggest that the effectiveness of school committees is closely associated with member capacity, transparency in communication, and sustained commitment from educational stakeholders.*

**Keywords:** *School Committee, School–Community Relations, Educational Management, Madrasah, Stakeholder Participation*

### **Abstrak**

Peran komite madrasah memiliki posisi strategis dalam memperkuat hubungan antara madrasah dan masyarakat serta meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran komite madrasah dalam meningkatkan hubungan masyarakat di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah di kedua lembaga telah menjalankan perannya secara cukup efektif melalui empat fungsi utama, yaitu sebagai badan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kurikulum dan perencanaan anggaran, badan pendukung dalam penyediaan dukungan finansial, intelektual, dan tenaga, badan pengawas dalam pelaksanaan serta evaluasi program, dan mediator dalam menjembatani komunikasi antara madrasah dan masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya finansial dan lemahnya koordinasi partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas komite madrasah sangat dipengaruhi oleh kapasitas anggota, transparansi komunikasi, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

**Kata Kunci:** Komite Madrasah, Hubungan Madrasah-Masyarakat, Manajemen Pendidikan, Madrasah, Partisipasi Stakeholder

## A. Pendahuluan

Sekolah sebagai sistem terbuka harus dapat menyesuaikan diri dan mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu.<sup>1</sup> Untuk itu, diperlukan peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui berbagai organisasi, termasuk komite madrasah. Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan berfungsi fundamental dalam kehidupan seseorang.<sup>2</sup> Pendidikan yang bermutu hanya dapat terwujud dari pola dan sistem pendidikan yang baik, yang didukung oleh kurikulum yang relevan serta partisipasi aktif dari semua komponen pendidikan.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Bandar Lampung, khususnya MIN 6 dan MIN 9, merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar yang berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh lingkungan keluarga, masyarakat, dan dukungan organisasi komite madrasah.<sup>3</sup> Hubungan kerja sama antara kepala madrasah dengan komite madrasah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan efisien.<sup>4</sup>

Dalam era desentralisasi pendidikan dengan penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), komite madrasah menjadi organisasi yang semakin penting. Komite madrasah berfungsi sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.<sup>5</sup> Peran komite madrasah mencakup empat dimensi utama: sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui komite madrasah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.<sup>6</sup> Khususnya, penelitian Dermawan tentang partisipasi wali murid di Sekolah Dasar menemukan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat memberikan kontribusi nyata terhadap

---

<sup>1</sup> Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 1-5.

<sup>2</sup> Qomar, M. (2020). *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner*. Malang: Madani Media, hal. 23-28.

<sup>3</sup> Dermawan, O., & Wulandari, A. (2021). "Implementation of Education Business Management in Bandar Lampung." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 45-58.

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ghofur, A., Kuipers, J. C., & Askuri. (2021). "Instructional Design: Multi-Site Study of the Integration of Islam in Science Teaching in Java, Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 4(1), 70-84.

peningkatan kepercayaan dan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>7</sup> Penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi bahwa keaktifan komite madrasah dalam menjalankan fungsinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan madrasah.<sup>8</sup> Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat yang optimal dan ketersediaan sumber daya finansial.

Berdasarkan hasil pengamatan pra penelitian pada tanggal 21 Juli 2025 di MIN 6 Bandar Lampung dan MIN 9 Bandar Lampung, diperoleh data bahwa organisasi komite madrasah telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik sesuai dengan visi dan misinya, salah satunya yaitu dalam meningkatkan kinerja madrasah tersebut. Akan tetapi, ada permasalahan terkait dengan pelaksanaan peran komite yaitu pada aspek faktor pendukung yang memiliki permasalahan mengenai dukungan finansial, pemikiran, dan tenaga kerja dalam penyelenggaraan pendidikan yang belum berjalan dengan optimal. Selain itu, pada fungsi mediator masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat serta dalam menampung apresiasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak madrasah.<sup>9</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung menjalankan perannya dalam meningkatkan hubungan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang peran komite madrasah dalam konteks lokal dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan manajemen pendidikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah-madrasah lainnya, terutama dalam era implementasi Manajemen Berbasis Madrasah yang menekankan desentralisasi dan pemberdayaan komunitas.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran komite madrasah dalam memperkuat hubungan antara madrasah dan masyarakat.<sup>10</sup> Lokasi penelitian ditetapkan di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung dengan pertimbangan bahwa kedua madrasah tersebut memiliki karakteristik kelembagaan dan keterlibatan komite yang relatif aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan

---

<sup>7</sup> Dermawan, O. (2016). "Partisipasi Wali Murid di Sekolah Dasar (SD) Kuttab Al Fatih Bandar Lampung." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(2), 219-235.

<sup>8</sup> Alhamuddin, A., Dermawan, O., Azis, H., & Erlangga, R. D. (2022). "Character Education Based on Minangkabau Local Wisdom." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 185-204.

<sup>9</sup> Dermawan, O. (2020). "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro Lampung." *JTEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(1), 89-105.

<sup>10</sup> Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), Hlm. 6-10

dokumentasi.<sup>11</sup> Wawancara dilakukan kepada kepala madrasah, pengurus komite madrasah, guru, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip program kerja, laporan kegiatan, notulen rapat, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan empat fungsi utama komite madrasah, yaitu sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator.<sup>12</sup> Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara dan data dokumentasi.<sup>13</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif, objektif, dan kontekstual mengenai implementasi peran komite madrasah dalam meningkatkan hubungan madrasah dan masyarakat.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung telah menjalankan fungsi sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) secara relatif optimal dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis di tingkat madrasah. Optimalisasi peran ini tercermin dari keterlibatan komite dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pendidikan yang dilaksanakan secara partisipatif dan berkelanjutan. Komite tidak hanya hadir secara formal dalam struktur organisasi, tetapi berperan aktif dalam proses deliberasi kebijakan melalui forum-forum resmi seperti rapat kerja tahunan, rapat penyusunan program madrasah, serta pertemuan evaluasi kinerja program.

Dalam praktiknya, komite secara rutin mengikuti rapat koordinasi bersama kepala madrasah dan dewan guru untuk membahas arah kebijakan kelembagaan, penentuan program prioritas, serta strategi pengembangan mutu pendidikan. Pada forum-forum tersebut, komite memberikan masukan terkait penguatan layanan pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya pendidik, serta penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai keislaman. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa komite tidak hanya berperan sebagai pihak pendukung administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan pendidikan.

---

<sup>11</sup> Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 155-170.

<sup>12</sup> Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hal. 10-18.

<sup>13</sup> Moleong, L. J. (2000), op. cit., hal. 175-180.

Masukan yang disampaikan oleh komite bersifat substantif dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan riil peserta didik, aspirasi orang tua, serta dinamika sosial masyarakat sekitar madrasah. Selain itu, komite juga menyoroti tantangan pendidikan di era digital, seperti kebutuhan penguatan literasi digital, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pengawasan terhadap dampak negatif penggunaan gawai pada peserta didik. Dengan demikian, peran *advisory agency* yang dijalankan komite madrasah berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam aspek perencanaan kurikulum dan pembelajaran, komite madrasah turut memberikan rekomendasi yang bersifat kontekstual. Meskipun kewenangan teknis pengembangan kurikulum berada pada pihak madrasah, komite berperan memberikan perspektif eksternal mengenai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan sosial dan dunia kerja, penguatan karakter peserta didik, serta integrasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Peran ini menjadi penting karena memungkinkan madrasah menyusun program pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesiapan sosial peserta didik.

Selain itu, komite madrasah juga terlibat secara aktif dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Madrasah (RABM). Keterlibatan ini dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan prioritas, pembahasan alokasi anggaran, serta pemberian rekomendasi terkait efektivitas penggunaan dana. Komite berperan memastikan bahwa perencanaan anggaran selaras dengan tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan, transparansi pengelolaan keuangan, serta prinsip akuntabilitas publik.<sup>14</sup> Melalui mekanisme musyawarah dan diskusi bersama pihak madrasah, proses perencanaan anggaran menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata lembaga.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Dermawan yang menegaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam manajemen strategis lembaga pendidikan berkontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas kebijakan organisasi.<sup>15</sup> Dalam konteks ini, komite madrasah berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan internal madrasah dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, peran *advisory agency* tidak hanya memperkuat tata kelola madrasah, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan yang lebih sinergis antara madrasah dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan.

---

<sup>14</sup> Dermawan, O. (2020). *Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Jakarta: Edu Pustaka, hal. 45-65.

<sup>15</sup> Dermawan, O. (2020). "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro Lampung." *JIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(1), 89-105.

## 2. Peran Komite Madrasah sebagai Pendukung (*Supporting Agency*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung menjalankan fungsi sebagai *supporting agency* secara aktif melalui penyediaan dukungan sumber daya yang bersifat finansial, intelektual, dan tenaga kerja. Peran pendukung ini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan madrasah serta menunjang keberlanjutan program pendidikan, khususnya dalam kondisi keterbatasan anggaran dan sumber daya internal madrasah.

*Pertama*, dukungan finansial yang diberikan komite madrasah berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta pembiayaan kegiatan pengembangan peserta didik. Komite melakukan penggalangan dana dari berbagai unsur masyarakat melalui mekanisme yang bersifat partisipatif, seperti iuran sukarela orang tua peserta didik, donasi dari tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal, serta kegiatan gotong royong yang diarahkan untuk menghasilkan dana sosial pendidikan. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas pembelajaran, perbaikan ruang kelas, pengadaan alat peraga pendidikan, serta pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler dan program inovatif madrasah. Pola pengelolaan dana ini menunjukkan bahwa komite tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun sumber daya, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan keberlangsungan program pendidikan yang bermutu.<sup>16</sup>

*Kedua*, dukungan intelektual diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, gagasan, dan jejaring keilmuan yang dimiliki anggota komite dan masyarakat sekitar. Komite berperan dalam memberikan ide-ide inovatif terkait pengembangan program pendidikan, seperti penguatan literasi, pembinaan karakter religius, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, komite juga memfasilitasi keterlibatan tenaga ahli dari kalangan masyarakat, seperti akademisi, praktisi pendidikan, tokoh agama, dan profesional, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada siswa dan guru melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan pembinaan tematik. Kontribusi intelektual ini memperkaya wawasan pedagogis madrasah serta mendorong terjadinya transfer pengetahuan yang bersifat kontekstual dan aplikatif.

*Ketiga*, dukungan tenaga kerja tercermin dalam keterlibatan langsung anggota komite dan masyarakat dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial madrasah. Partisipasi tersebut meliputi kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, perbaikan

---

<sup>16</sup> Abdul Rasid, Suwignyo Widagdo, & Lia Rachmawati (2024). *Efektivitas Pengelolaan Dana Komite dalam Upaya Mendukung Pembiayaan Pendidikan pada MTs N 1 Banyuwangi*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, Vol. 30 No. 2, 279–292. DOI: 10.59725/ema.v30i2.173

ringan sarana dan prasarana, pengadaan dan penataan inventaris, serta keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Partisipasi berbasis kesukarelaan ini tidak hanya membantu meringankan beban operasional madrasah, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan demikian, madrasah tidak dipandang sebagai institusi yang terpisah dari masyarakat, melainkan sebagai bagian integral dari komunitas sosial.

Secara keseluruhan, peran komite madrasah sebagai supporting agency di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendidikan tidak terbatas pada aspek finansial semata, tetapi juga mencakup kontribusi intelektual dan sosial. Sinergi antara madrasah dan masyarakat ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

### 3. Peran Komite Madrasah sebagai Pengawas (*Controlling Agency*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung menjalankan fungsi pengawasan (*controlling agency*) sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan program, evaluasi pengelolaan sumber daya, serta penilaian terhadap capaian hasil pendidikan yang secara keseluruhan diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program madrasah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

*Pertama*, pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan madrasah dilakukan secara berkala melalui observasi langsung dan laporan pelaksanaan kegiatan. Komite secara aktif mengikuti perkembangan implementasi program prioritas, baik yang berkaitan dengan kegiatan akademik, penguatan karakter, maupun pengembangan sarana dan prasarana. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pihak madrasah. Dengan demikian, komite tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai mitra reflektif yang memberikan umpan balik konstruktif bagi perbaikan pelaksanaan program.

*Kedua*, evaluasi terhadap alokasi dana dan penggunaan sumber daya menjadi aspek penting dalam fungsi pengawasan komite madrasah. Komite secara periodik meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dari pihak madrasah, kemudian melakukan verifikasi terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Anggaran dan Belanja Madrasah (RABM). Proses ini mencakup penelusuran sumber dana, baik yang berasal dari bantuan pemerintah, partisipasi orang tua, maupun sumbangan masyarakat. Melalui

mekanisme ini, komite berupaya memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Praktik pengawasan finansial ini juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan madrasah.

*Ketiga*, penilaian terhadap keluaran (*output*) pendidikan dilakukan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja pendidikan, seperti prestasi akademik siswa, tingkat kelulusan, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta capaian non-akademik lainnya. Data tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama antara komite, kepala madrasah, dan dewan guru untuk menilai efektivitas program pembelajaran. Selain itu, informasi mengenai capaian pendidikan juga disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial lembaga pendidikan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini diperkuat melalui mekanisme kelembagaan berupa rapat koordinasi rutin, baik yang dilaksanakan secara bulanan maupun berdasarkan kebutuhan tertentu, serta kunjungan langsung komite ke lingkungan madrasah. Selain itu, komite juga menyelenggarakan forum dengar pendapat dengan wali murid dan tokoh masyarakat untuk menjaring aspirasi, masukan, serta kritik konstruktif terkait kualitas layanan pendidikan. Forum ini menjadi sarana partisipatif yang efektif dalam mengidentifikasi permasalahan aktual yang dihadapi madrasah, sekaligus memperkuat hubungan antara madrasah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, peran komite madrasah sebagai *controlling agency* di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi kualitas layanan pendidikan dan kepuasan pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan komite madrasah memiliki kontribusi strategis dalam mendorong tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **4. Peran Komite Madrasah sebagai Mediator (*Mediator Agency*)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung menjalankan peran sebagai mediator (*mediator agency*) dalam menjembatani hubungan komunikasi antara madrasah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah. Peran ini menjadi sangat strategis karena keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal madrasah, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat. Dalam konteks ini, komite madrasah berfungsi sebagai simpul komunikasi yang menghubungkan kepentingan institusional madrasah dengan aspirasi sosial masyarakat.

*Pertama*, penyaluran aspirasi masyarakat kepada pihak madrasah dilakukan melalui mekanisme formal dan informal, seperti forum pertemuan wali murid, diskusi kelompok, serta komunikasi langsung antara anggota komite dan masyarakat. Komite menghimpun berbagai masukan berupa harapan, kritik, saran, dan keluhan yang berkaitan dengan kualitas layanan pendidikan, fasilitas madrasah, maupun kebijakan internal. Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan dan disampaikan kepada kepala madrasah serta dewan guru dalam forum koordinasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Proses ini menunjukkan bahwa komite tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pengelola aspirasi publik yang berupaya menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kapasitas dan kebijakan madrasah.

*Kedua*, sosialisasi program dan kebijakan madrasah kepada masyarakat menjadi bagian penting dari peran mediasi yang dijalankan oleh komite. Komite membantu pihak madrasah dalam menyampaikan informasi terkait visi dan misi lembaga, arah pengembangan program pendidikan, kebijakan akademik dan non-akademik, serta rencana kegiatan tahunan. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan orang tua siswa, kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan sekitar madrasah, serta media komunikasi yang tersedia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan madrasah, sekaligus membangun dukungan dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap lembaga pendidikan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, fasilitasi komunikasi dua arah antara madrasah dan masyarakat dilakukan dengan mengorganisasi forum dialog dan pertemuan bersama. Komite memediasi interaksi antara pihak madrasah dan masyarakat guna membahas berbagai persoalan pendidikan, menyelesaikan potensi konflik, serta membangun kesepahaman bersama. Melalui komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif, komite berperan dalam menciptakan iklim hubungan yang harmonis dan kolaboratif. Mekanisme ini juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih terbuka, sehingga kebijakan madrasah dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan nyata masyarakat.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi mediator belum sepenuhnya optimal. Tidak semua aspirasi dan masukan masyarakat dapat diakomodasi secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan madrasah. Sebagian masyarakat masih merasakan keterbatasan ruang partisipasi dan kurangnya

---

<sup>17</sup> Klein, J. T. (2018). "Learning in Transdisciplinary Collaborations: A Conceptual Vocabulary." In *Transdisciplinary Theory, Practice and Education: The Art of Collaborative Research and Collective Learning* (pp. 1-15), edited by Dena Fam, Linda Neuhauser, and Paul Gibbs. Cham: Springer International Publishing.

umpan balik terhadap aspirasi yang telah disampaikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis, transparan, dan responsif, sehingga peran komite sebagai mediator tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar mampu mendorong partisipasi publik yang bermakna dalam pengelolaan pendidikan.

Sampai disini dapat kita pahami, peran komite madrasah sebagai mediator di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung menunjukkan kontribusi penting dalam memperkuat relasi kemitraan antara madrasah dan masyarakat. Optimalisasi fungsi ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik, memperluas dukungan sosial, serta memperkuat tata kelola pendidikan yang partisipatif dan berkelanjutan.

## 5. Efektivitas Peran Komite Madrasah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung telah menjalankan keempat fungsi utamanya, sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency* secara relatif efektif. Komite tidak hanya berperan sebagai institusi pendukung yang bersifat administratif, tetapi juga berfungsi secara aktif dalam memberikan masukan strategis, mendorong perbaikan tata kelola pendidikan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program madrasah. Efektivitas peran tersebut tercermin dalam beberapa indikator kinerja kelembagaan.

*Pertama*, tingkat partisipasi anggota komite dalam berbagai forum perencanaan, evaluasi, dan kegiatan madrasah tergolong tinggi. Keterlibatan aktif ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi tersebut tidak terbatas pada kehadiran dalam rapat formal, tetapi juga mencakup keterlibatan langsung dalam kegiatan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh madrasah. Kedua, kontribusi komite dalam pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan program pendidikan menunjukkan peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk finansial, tenaga, maupun gagasan inovatif, berkontribusi terhadap terpenuhinya kebutuhan fasilitas pembelajaran dan terlaksananya program-program pengembangan madrasah yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

*Ketiga*, keberadaan komite madrasah turut berperan dalam meningkatkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap madrasah. Melalui fungsi mediasi dan komunikasi yang dijalankan, komite mampu membangun hubungan kemitraan yang lebih harmonis antara madrasah dan masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya dukungan sosial serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam berbagai aktivitas

pendidikan. *Keempat*, kemampuan komite dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan serta merumuskan alternatif solusi menunjukkan peran strategisnya dalam proses pengambilan keputusan. Komite secara aktif menyampaikan masukan terkait kendala yang dihadapi madrasah, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran, dan tantangan manajerial, sehingga menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan internal madrasah.

Efektivitas ini didukung oleh beberapa faktor positif :<sup>18</sup> (1) komitmen anggota komite terhadap peningkatan mutu pendidikan, (2) keterbukaan kepala madrasah untuk menerima saran dan masukan dari komite, (3) partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan madrasah, dan (4) dukungan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan komite madrasah. Penelitian sebelumnya oleh Dermawan dan Wulandari menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di tingkat madrasah dasar berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan.<sup>19</sup> Penelitian lain juga menemukan bahwa komite sekolah yang efektif mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai cara termasuk penggalangan dana, pengawasan implementasi kebijakan, dan fasilitasi partisipasi masyarakat.<sup>20</sup>

## 6. Tantangan dalam Pelaksanaan Peran Komite

Meskipun komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung telah menunjukkan kinerja yang relatif efektif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan peran komite. Tantangan-tantangan tersebut mencakup aspek finansial, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat. *Pertama*, keterbatasan finansial menjadi kendala utama dalam mendukung keberlanjutan program pengembangan madrasah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang heterogen menyebabkan kapasitas penggalangan dana tidak selalu sejalan dengan kebutuhan riil madrasah. Keterbatasan ini terutama berdampak pada pembiayaan pengadaan sarana teknologi pembelajaran, rehabilitasi infrastruktur berskala besar, serta program peningkatan kompetensi guru.<sup>21</sup> Akibatnya, komite sering kali harus melakukan skala

---

<sup>18</sup> Chili, T. R., Dermawan, O., & Yetri, Y. (2025). "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Literatur Review." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(3), 1-15.

<sup>19</sup> Dermawan, O., & Wulandari, A. (2021), op. cit.

<sup>20</sup> Fauziana, A. O., Yetri, Y., Fauzan, A., & Dermawan, O. (2024). "Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1131-1145.

<sup>21</sup> Dermawan, O. (2023). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring Organik di Desa Budi Lestari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 275-284.

prioritas dengan memfokuskan alokasi dana pada kebutuhan yang bersifat mendesak, sementara program pengembangan jangka panjang cenderung tertunda.

*Kedua*, keterbatasan waktu dan keahlian anggota komite turut memengaruhi efektivitas kinerja kelembagaan. Sebagian besar anggota komite memiliki profesi utama di luar aktivitas madrasah, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan komite belum dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, variasi latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional menyebabkan tidak semua anggota memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen pendidikan, tata kelola organisasi, dan pengelolaan keuangan. Kondisi ini berdampak pada kesulitan dalam memahami laporan keuangan, perencanaan anggaran, serta konsep manajerial yang bersifat teknis, sehingga diperlukan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

*Ketiga*, aspek koordinasi dan komunikasi kelembagaan masih memerlukan penguatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa arus informasi antara komite, madrasah, dan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi strategis komite madrasah dan cenderung memandang komite hanya sebagai lembaga pengumpul dana. Keterbatasan komunikasi ini berdampak pada rendahnya tingkat transparansi informasi dan berkurangnya peluang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan pendidikan.<sup>22</sup>

*Keempat*, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih menunjukkan variasi tingkat partisipasi. Kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi rendah relatif kurang terlibat dalam kegiatan madrasah, baik dalam bentuk dukungan material maupun non-material. Selain itu, masih ditemukan persepsi di kalangan sebagian orang tua siswa yang memandang pendidikan sebagai tanggung jawab eksklusif lembaga sekolah, tanpa menyadari pentingnya peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan.<sup>23</sup> Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa keberhasilan peran komite madrasah tidak semata-mata bergantung pada keberadaan

---

<sup>22</sup> Maskur, R., Suherman, S., Andari, T., Dermawan, O., & Anggoro, B. S. (2022). "Reciprocal Teaching and Certainty of Response Index Learning Model Impact of Mastery Mathematics on Curriculum 2013." *Перспективы науки и образования*, 56(2), 273-284.

<sup>23</sup> Drake, S. M., & Reid, J. L. (2020). "21st Century Competencies in Light of the History of Integrated Curriculum." *Frontiers in Education*, 5, 122. <https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00122>

struktur organisasi formal, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya, kemampuan para pelaksana, keterbukaan komunikasi, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan komite madrasah perlu dilakukan secara kolaboratif melalui keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, mulai dari pengelola madrasah, orang tua, masyarakat, hingga pemerintah, agar tercipta sinergi yang berkelanjutan dalam meningkatkan mutu Pendidikan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan pandangan bahwa komite madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi masyarakat. Penelitian Dermawan tentang manajemen strategik dalam peningkatan kualitas pendidikan menekankan bahwa kepemimpinan efektif dan partisipasi stakeholder adalah faktor kunci dalam pencapaian tujuan pendidikan.<sup>24</sup> Pemimpin pendidikan harus mampu membangun kolaborasi yang kuat dengan semua stakeholder termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Perspektif sistem terbuka dalam organisasi pendidikan juga diperkuat oleh temuan ini. Madrasah sebagai sistem terbuka membutuhkan interaksi berkelanjutan dengan lingkungannya, termasuk masyarakat dan pemerintah, untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan lembaga pendidikan.<sup>25</sup> Komite madrasah menjadi mekanisme yang memfasilitasi interaksi ini dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program pendidikan.

Temuan juga sejalan dengan konsep manajemen berbasis madrasah yang menekankan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, komite madrasah bukan hanya organ administratif, tetapi juga wahana untuk mengaktualisasikan aspirasi dan potensi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.<sup>26</sup> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah secara jelas menggarisbawahi pentingnya peran komite dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.<sup>27</sup>

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendeskripsikan bagaimana komite madrasah di dua lembaga pendidikan di Bandar Lampung menjalankan keempat perannya secara konkret dan kontekstual. Perspektif multi-situs (studi di MIN 6 dan MIN 9) memungkinkan identifikasi kesamaan pola dan perbedaan dalam pelaksanaan peran komite, yang memberikan wawasan berharga tentang dinamika komite madrasah di konteks perkotaan. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang tantangan-tantangan

---

<sup>24</sup> Dermawan, O. (2020). "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro Lampung." *JIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(1), 89-105.

<sup>25</sup> Danim, S. (2002), op. cit., hal. 25-35.

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002, op. cit.

<sup>27</sup> Ibid.

spesifik yang dihadapi komite madrasah di konteks daerah perkotaan dengan heterogenitas masyarakat. Rekomendasi praktis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai masukan bagi peningkatan efektivitas komite madrasah di lembaga-lembaga pendidikan sejenis, baik di tingkat madrasah dasar maupun di jenjang pendidikan lainnya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komite madrasah di MIN 6 dan MIN 9 Bandar Lampung telah menjalankan empat peran utama, yaitu sebagai *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency*, secara relatif efektif. Komite madrasah berkontribusi nyata dalam memperkuat hubungan antara madrasah dan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara spesifik, komite madrasah berperan aktif sebagai badan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, memberikan dukungan dalam aspek finansial, intelektual, dan sumber daya manusia, melakukan pengawasan melalui forum evaluasi dan kunjungan lapangan, serta menjadi penghubung komunikasi antara madrasah dan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan pendanaan dan koordinasi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas anggota komite melalui pelatihan manajemen pendidikan dan kepemimpinan, peningkatan transparansi serta mekanisme komunikasi, diversifikasi strategi penggalangan dana, dan pengembangan program partisipatif yang inklusif. Penguatan peran komite madrasah sebagai mitra strategis madrasah merupakan investasi penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

#### **Referensi**

- Alhamuddin, A., Dermawan, O., Azis, H., & Erlangga, R. D. (2022). "Character Education Based on Minangkabau Local Wisdom." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 185-204.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chili, T. R., Dermawan, O., & Yetri, Y. (2025). "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Literatur Review." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(3), 1-15.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Defriyanto, D., & Dermawan, O. (2018). "Prevalensi Kesulitan Belajar Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri I Bandar Lampung." *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 5(1), 45-58.
- Dermawan, O. (2013). "Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB." *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 886-897.
- Dermawan, O. (2016). "Partisipasi Wali Murid di Sekolah Dasar (SD) Kuttab Al Fatih Bandar Lampung." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 6(2), 219-235.

- Dermawan, O. (2019). "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching di Sekolah Dasar." *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan*, 29(1), 86-95.
- Dermawan, O. (2020). *Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Dermawan, O. (2020). "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro Lampung." *JIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(1), 89-105.
- Dermawan, O., & Bunyamin, M. (2020). "Contestation Between Islamic Authority and Local Culture in Marriage Law in Jordan." In *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Development* (pp. 234-245). Lampung: UIN Raden Intan.
- Dermawan, O., & Wulandari, A. (2021). "Implementation of Education Business Management in Bandar Lampung." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 45-58.
- Dermawan, O. (2023). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring Organik di Desa Budi Lestari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 275-284.
- Dermawan, O. (2023). *Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Jakarta: UIN Raden Intan Lampung.
- Dermawan, O., Nisak, K., Defriyanto, D., & Busmayaril, B. (2022). "The Use of Basic Counseling Skills in Individual Counseling Sessions by Counseling Guidance Students." *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 9(1), 113-118.
- Drake, S. M., & Reid, J. L. (2020). "21st Century Competencies in Light of the History of Integrated Curriculum." *Frontiers in Education*, 5, 122. <https://doi.org/10.3389/educ.2020.00122>
- Fauziana, A. O., Yetri, Y., Fauzan, A., & Dermawan, O. (2024). "Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1131-1145.
- Ghofur, A., Kuipers, J. C., & Askuri. (2021). "Instructional Design: Multi-Site Study of the Integration of Islam in Science Teaching in Java, Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 4(1), 70-84.
- Jayusman, J., & Dermawan, O. (2018). "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 26(2), 251-271.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Klein, J. T. (2018). "Learning in Transdisciplinary Collaborations: A Conceptual Vocabulary." In *Transdisciplinary Theory, Practice and Education: The Art of Collaborative Research and Collective Learning* (pp. 1-15).
- Lama, A. V., Sain, Z. H., Dermawan, O., Thelma, C. C., & Agoi, M. A. (2024). "Revolutionary Teaching Approaches: Exploring the Educational Landscape in Pakistan via Outcome-Based Education." *Journal of Information Systems and Technology Research*, 3(2), 73-79.
- Maskur, R., Suherman, S., Andari, T., Dermawan, O., & Anggoro, B. S. (2022). "Reciprocal Teaching and Certainly of Response Index Learning Model Impact of Mastery Mathematics on Curriculum 2013." *Перспективы науки и образования*, 56(2), 273-284.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qomar, M. (2020). *Pendidikan Islam Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner*. Malang: Madani Media.
- Rabasa, A. (2005). "Islamic Education in Southeast Asia." Hudson Institute, September 12, 2005. Diakses dari <http://www.hudson.org/research/9814-islamic-education-in-southeast-asia>